

Keterlibatan Perempuan dalam Politik Lokal di Desa Perawang Barat: Analisis Peran Ibu KPPS dalam Proses Pemilihan Umum

Marly Meani Silalahi¹, Silvia Maharani², Ulan Dari³, Putriana Sinaga⁴, Alfonsius Ligor⁵, Julia Ivanna⁶

^{1,2,3,4,5,6} Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan
e-mail: marlymeani23@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan perempuan dalam politik lokal, khususnya peran Ibu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Perawang Barat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibu KPPS memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di tingkat lokal, meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti stereotip gender dan kurangnya dukungan dari masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai peran perempuan dalam politik lokal serta memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk merancang program yang mendukung pemberdayaan perempuan. Temuan ini juga berkontribusi pada penguatan demokrasi lokal dengan meningkatkan transparansi dan efektivitas pemilu. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya peran perempuan dalam proses politik dan perlunya kebijakan yang lebih inklusif untuk meningkatkan partisipasi mereka.

Kata kunci: *Demokrasi Lokal, Keterlibatan Perempuan, KPPS*

Abstract

This study aims to analyze the involvement of women in local politics, specifically the role of mothers in the Election Organizing Group (KPPS) in Perawang Barat Village. Using a qualitative approach, the research collected data through interviews and documentation. The findings indicate that mothers in KPPS play a significant role in enhancing women's political participation at the local level, although they still face various challenges, such as gender stereotypes and a lack of support from the community. This research is expected to enrich the academic literature on the role of women in local politics and provide recommendations for policymakers to design programs that support women's empowerment. The findings also contribute to strengthening local democracy by improving the transparency and effectiveness of elections. Thus, this study emphasizes the importance of women's roles in the political process and the need for more inclusive policies to enhance their participation.

Keywords : *Local Democracy, Women's Involvement, KPPS*

PENDAHULUAN

Para pendiri negeri ini, sungguh sangat arif dalam menyusun UUD 1945 menghargai peranan wanita pada masa silam dan mengantisipasi pada masa yang akan datang, dengan tidak ada satu kata pun yang bersifat diskriminatif terhadap wanita. Konstitusi ini dengan tegas menyatakan persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara (baik pria maupun wanita). Di dalam GBHN 1993 di antaranya juga diamanatkan, bahwa wanita mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pria dalam pembangunan. Selain itu, pengambil keputusan juga telah meratifikasi (mengesahkan) konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dalam UU No. 7 Tahun 1984.

Namun, kenyataan menunjukkan bahwa wanita mengalami ketertinggalan atau ketidakberuntungan lebih banyak dibandingkan dengan pria di antaranya di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, penguasaan dan 1 pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Oleh karena itu, peningkatan peranan wanita dalam pembangunan yang berwawasan gender sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, mempunyai arti penting dalam upaya untuk mewujudkan kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dengan wanita atau mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. "The achievement of democracy presupposes a genuine partnership between men and women in the conduct of the affairs of society in which they work in equality and complementarity, drawing mutual enrichment from their differences". (Pencapaian tujuan demokrasi mensyaratkan kerjasama yang sungguh-sungguh antara laki-laki dan perempuan untuk menyelenggarakan berbagai urusan masyarakat dimana mereka bekerjasama secara adil dan saling membantu dengan memanfaatkan kelebihan yang datang dari perbedaan-perbedaan diantara mereka). (Inter-Parliamentary Union. 2000).

Menurut Firman Noor, kepala puslit (pusat penelitian) politik LIPI. Ada beberapa negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi terjebak oligarki dan menjadi akar bagi terciptanya oligarki, termasuk di Indonesia. Salah satu institusi yang turut berperan adalah partai politik. Apabila penulis kaitkan dengan politik kehadiran (political presence) sebagai bentuk perjuangan politik Perempuan yang mana dapat di ketahui bahwasannya dalam partai politik yang lebih dominan menduduki kursi legislatif ialah laki-laki. Oleh karenanya, dalam proses demokratisasi, persoalan partisipasi politik Perempuan yang lebih besar, representasi dan persoalan akuntabilitas menjadi persyaratan mutlak bagi terwujudnya demokrasi yang lebih bermakna di Indonesia. Demokrasi yang bermakna adalah demokrasi yang memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan mayoritas penduduk Indonesia yang terdiri dari Perempuan. Berdasarkan hal tersebut maka pentingnya kebijakan dan peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi politik Perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender, namun di sisi lain dapat diketahui bahwa terdapat Perempuan yang memang memiliki ide-ide namun tidak memiliki modal yang besar untuk menjadi calon legislatif dan juga tidak terlalu populer di lingkungan sosial.

Ada beberapa faktor lainnya yang menjadi penghambat political of presence sebagai bentuk perjuangan politik Perempuan seperti hambatan structural, institusi politik dan budaya patriarki. Oleh karenanya, penting untuk meningkatkan partisipasi politik Perempuan sebagaimana yang telah penulis sampaikan sebelumnya bahwa demokrasi yang bermakna adalah demokrasi yang memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan mayoritas penduduk Indonesia yang terdiri dari Perempuan supaya terwujudnya demokrasi yang lebih bermakna di Indonesia. Pada dasarnya hanya perempuan saja yang paling mengerti kebutuhan atau kesejahteraan kaumnya sesama Perempuan.

Desa Perawang Barat, khususnya di RT 009 RW 001, menunjukkan dinamika politik yang hidup dengan partisipasi aktif perempuan dalam berbagai kegiatan. Antusiasme ibu-ibu di wilayah ini sangat menonjol, terutama dalam keterlibatan mereka sebagai anggota KPPS pada pemilihan umum yang diselenggarakan pada bulan Februari 2024. Peran perempuan dalam politik lokal tidak hanya terbatas pada kegiatan administratif, tetapi juga mencakup partisipasi langsung dalam proses pemilihan, yang menjadi pilar penting dalam demokrasi desa. Keaktifan mereka sebagai anggota KPPS mencerminkan komitmen kuat terhadap kesuksesan penyelenggaraan pemilu, sekaligus memperlihatkan bahwa perempuan di Desa Perawang Barat memiliki peran yang signifikan dalam pengambilan keputusan politik dan keberlanjutan demokrasi di tingkat lokal. Pemilu lokal dan pemilu nasional memiliki perbedaan mendasar dalam skala, fokus, dan dampaknya.

Pemilu nasional melibatkan pemilihan pejabat di tingkat negara, seperti presiden dan anggota legislatif nasional, dengan isu-isu yang mencakup kepentingan seluruh bangsa. Sementara itu, pemilu lokal lebih terkonsentrasi pada pemilihan pejabat daerah seperti kepala desa, BPD, atau anggota DPRD, yang fokus utamanya adalah isu-isu spesifik yang langsung mempengaruhi komunitas setempat. Tantangan pemilu lokal sering kali melibatkan keterbatasan sumber daya, infrastruktur pemilihan yang terbatas, serta potensi dominasi politik keluarga atau elit lokal yang bisa mempengaruhi hasil pemilu. Selain itu, partisipasi perempuan sebagai penyelenggara seperti KPPS juga menghadapi tantangan dari segi stereotip gender dan akses terhadap pendidikan politik yang setara, meskipun antusiasme perempuan di beberapa desa, seperti Perawang Barat, menunjukkan perkembangan positif dalam hal keterlibatan politik lokal.

KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) memiliki fungsi dan tanggung jawab penting dalam proses pemilihan umum, termasuk memastikan kelancaran jalannya pemungutan suara, mengatur tempat pemungutan suara (TPS), mendata pemilih, dan menjaga integritas serta keamanan proses pemilihan. Mereka juga bertanggung jawab untuk menghitung suara secara transparan dan melaporkan hasilnya kepada lembaga yang berwenang. Keterlibatan ibu-ibu dalam KPPS menjadi representasi penting bagi perempuan dalam politik, karena memperlihatkan bahwa perempuan tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam penyelenggaraan demokrasi di tingkat lokal. Keikutsertaan perempuan di KPPS memperkuat posisi mereka dalam pengambilan keputusan politik dan menginspirasi lebih banyak perempuan untuk terlibat aktif dalam proses politik, sekaligus menantang stereotip gender yang masih ada.

Perempuan yang berpartisipasi dalam politik sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk stereotip gender dan pembatasan sosial. Banyak perempuan masih dihadapkan pada persepsi tradisional yang menganggap bahwa politik adalah dunia laki-laki, sementara peran perempuan lebih dibatasi pada urusan domestik. Stereotip ini menimbulkan hambatan psikologis dan kultural yang menghalangi perempuan untuk terlibat dalam politik secara penuh, baik sebagai calon pemimpin maupun sebagai penyelenggara pemilu, seperti KPPS. Selain itu, pembatasan sosial seperti akses yang kurang terhadap pendidikan politik, minimnya dukungan keluarga atau lingkungan, serta kurangnya representasi perempuan dalam lembaga politik juga menjadi faktor yang memperlambat kemajuan partisipasi perempuan. Tantangan lain meliputi tekanan dari sistem politik yang sering kali didominasi oleh elit atau kelompok patriarki, yang membuat perempuan merasa terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan.

Pentingnya representasi gender dalam lembaga politik tidak hanya berkaitan dengan keadilan sosial, tetapi juga dengan peningkatan kualitas kebijakan. Ketika perempuan terwakili secara memadai dalam lembaga politik, perspektif dan kebutuhan khusus mereka lebih mungkin dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan publik. Representasi yang seimbang juga mendorong keberagaman sudut pandang, sehingga keputusan politik lebih inklusif dan responsif terhadap seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, keberadaan perempuan dalam politik berfungsi sebagai model peran bagi generasi muda perempuan, yang dapat memotivasi mereka untuk melihat politik sebagai ruang di mana mereka dapat berkontribusi. Oleh karena itu, memperkuat representasi perempuan dalam lembaga politik adalah langkah penting untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih luas dan memperkaya demokrasi.

Partisipasi perempuan dalam pemilu di Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, baik di tingkat nasional maupun lokal. Menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada Pemilu 2019, partisipasi pemilih perempuan mencapai lebih dari 50%, mencerminkan peningkatan kesadaran politik perempuan di Indonesia. Di tingkat lokal, keterlibatan perempuan sebagai pemilih dan penyelenggara pemilu juga menunjukkan tren positif. Pada Pilkada 2020, banyak daerah mencatat peningkatan jumlah perempuan yang menjadi anggota KPPS dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Data ini memperlihatkan perubahan yang lebih inklusif dalam politik lokal, meskipun representasi perempuan dalam posisi strategis seperti kepala daerah masih rendah. Dorongan dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk mencapai kuota keterwakilan 30% perempuan di lembaga legislatif juga turut mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam ranah politik, baik sebagai kandidat maupun penyelenggara pemilu.

Keterlibatan perempuan dalam KPPS memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil pemilu dan kebijakan publik. Perempuan yang berperan sebagai penyelenggara pemilu, seperti di KPPS, membantu memastikan proses pemilihan berjalan dengan transparan, adil, dan inklusif. Pengalaman perempuan dalam komunitas sering kali memberi mereka kepekaan khusus terhadap kebutuhan kelompok yang mungkin terabaikan, seperti perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya. Dengan terlibat aktif di KPPS, perempuan dapat membawa perspektif yang lebih luas dan memastikan bahwa suara dari berbagai kelompok masyarakat diakui secara setara. Di Desa Perawang Barat, misalnya, keterlibatan ibu-ibu sebagai anggota KPPS selama pemilu Februari 2024 memperlihatkan bahwa perempuan memainkan peran penting dalam menjaga integritas proses pemilihan dan menciptakan lingkungan pemilihan yang ramah serta terbuka bagi seluruh warga desa.

Pengaruh keterlibatan perempuan di KPPS terhadap kebijakan publik juga signifikan, terutama jika partisipasi mereka mampu meningkatkan kesadaran politik di kalangan perempuan lain. Ketika perempuan aktif di KPPS dan terlibat langsung dalam proses pemilu, mereka memiliki kesempatan untuk memahami lebih dalam isu-isu politik yang mempengaruhi komunitas mereka. Ini dapat mendorong perempuan lain untuk lebih berpartisipasi dalam proses politik, baik sebagai pemilih maupun calon pemimpin. Contohnya, di beberapa daerah dengan keterlibatan perempuan yang tinggi dalam KPPS, pemilu berjalan dengan lebih inklusif, menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal, seperti perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan, yang sering kali menjadi perhatian utama perempuan.

Analisis keterlibatan perempuan dalam KPPS bertujuan untuk memahami dinamika partisipasi perempuan dalam proses pemilihan dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi serta kebijakan yang dihasilkan. Penelitian ini penting karena dapat memberikan wawasan berharga tentang cara meningkatkan partisipasi politik perempuan di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, dengan memperkuat pemberdayaan perempuan dalam ranah politik. Dengan mendorong lebih banyak perempuan untuk terlibat aktif dalam proses politik, Indonesia dapat menciptakan demokrasi yang lebih representatif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh rakyatnya, termasuk perempuan dan kelompok rentan lainnya

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami keterlibatan perempuan sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Perawang Barat dalam konteks politik lokal. Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan narasumber yang relevan, termasuk anggota KPPS dan masyarakat setempat, untuk menggali pandangan dan pengalaman mereka terkait partisipasi perempuan dalam proses pemilihan umum. Selain itu, observasi dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika interaksi di dalam KPPS dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam menjalankan peran mereka. Data sekunder juga digunakan, yang mencakup literatur terkait dan dokumen resmi yang mendukung analisis. Proses analisis data dilakukan dengan menyusun informasi secara sistematis dan menafsirkan makna dari data yang diperoleh, sehingga dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai peran perempuan dalam politik lokal dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Perawang Barat memiliki dampak yang signifikan terhadap proses pemilihan umum dan dinamika politik lokal. Melalui wawancara dengan dua responden, Ibu Khodijah dan Ibu Aisyah, terungkap bahwa motivasi utama mereka untuk terlibat dalam KPPS adalah keinginan untuk berkontribusi pada proses demokrasi di desa mereka. Ibu Khodijah menyatakan bahwa dengan menjadi bagian dari KPPS, ia merasa dapat memastikan bahwa pemilihan umum berjalan dengan lancar dan adil. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya berperan sebagai peserta, tetapi juga sebagai penggerak dalam menciptakan lingkungan pemilihan yang lebih baik.

Lebih lanjut, hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa kehadiran perempuan dalam KPPS memberikan perspektif yang berbeda dalam proses pemilihan. Ibu Aisyah menekankan bahwa perempuan dalam KPPS lebih peka terhadap kebutuhan dan aspirasi perempuan di desa, yang membantu memastikan bahwa suara mereka juga didengar. Ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam struktur penyelenggaraan pemilu dapat meningkatkan inklusivitas dan transparansi, yang merupakan elemen penting dalam demokrasi yang sehat.

Namun, penelitian ini juga menemukan berbagai tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam menjalankan fungsi mereka sebagai anggota KPPS. Hambatan struktural dan kultural, seperti stereotip gender dan kurangnya dukungan dari masyarakat, menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas partisipasi politik perempuan. Ibu Khodijah mengungkapkan bahwa

tantangan terbesar yang dihadapinya adalah kurangnya pengakuan terhadap peran perempuan dalam politik, yang sering kali mengakibatkan keraguan dari masyarakat terhadap kemampuan mereka. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk memberdayakan perempuan dan mengubah pandangan masyarakat tentang peran mereka dalam politik.

Pembahasan ini bertujuan untuk menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan, yaitu bagaimana keterlibatan perempuan dalam KPPS mencerminkan dinamika politik lokal dan peran gender dalam proses demokrasi partisipatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam KPPS tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas proses pemilihan umum, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat demokrasi lokal. Dengan motivasi yang kuat untuk berkontribusi pada proses demokrasi, perempuan dalam KPPS dapat memastikan bahwa semua suara, termasuk suara perempuan, terwakili dengan baik.

Integrasi temuan ini ke dalam kumpulan pengetahuan yang ada menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam politik lokal masih menghadapi berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan stereotip gender dan hambatan struktural. Penelitian ini sejalan dengan literatur yang ada yang menunjukkan bahwa perempuan sering kali terpinggirkan dalam proses politik, meskipun mereka memiliki potensi yang besar untuk berkontribusi. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengatasi hambatan yang ada.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan baru tentang bagaimana peran perempuan dalam KPPS dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas proses pemilihan umum, khususnya dalam hal transparansi dan inklusivitas. Dengan perspektif dan dedikasi mereka, perempuan dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat. Hal ini mengarah pada pengembangan teori baru yang menekankan pentingnya keterlibatan perempuan dalam struktur penyelenggaraan pemilu sebagai kunci untuk menciptakan demokrasi yang lebih representatif dan responsif.

Dalam konteks ini, penelitian ini juga menyoroti perlunya perubahan dalam norma sosial yang membatasi peran perempuan dalam politik. Upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan harus melibatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran perempuan dalam politik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pemahaman akademis tentang politik gender, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik di tingkat lokal.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan penelitian ini menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam KPPS di Desa Perawang Barat merupakan langkah penting dalam memperkuat demokrasi lokal. Dengan mendorong lebih banyak perempuan untuk terlibat aktif dalam proses politik, diharapkan akan tercipta demokrasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan lainnya. Penelitian ini memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong penelitian lebih lanjut dalam bidang ini.

SIMPULAN

Adapun melalui penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam KPPS di Desa Perawang Barat memiliki dampak yang signifikan terhadap proses pemilihan umum dan kualitas demokrasi lokal. Melalui partisipasi aktif Ibu Khodijah dan Ibu Aisyah, terlihat bahwa perempuan dapat berperan penting dalam memastikan transparansi dan keadilan dalam pemilihan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Keterlibatan mereka tidak hanya meningkatkan representasi perempuan dalam politik lokal, tetapi juga berkontribusi pada akuntabilitas dan integritas proses pemilihan, yang merupakan elemen kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai hambatan struktural dan kultural yang dihadapi perempuan, seperti stereotip gender dan kurangnya akses terhadap pelatihan serta dukungan. Hambatan-hambatan ini perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas partisipasi politik mereka. Dengan memahami tantangan yang ada, langkah-langkah strategis dapat dirumuskan untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi perempuan dalam berpartisipasi di ranah

politik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa suara perempuan tidak hanya didengar, tetapi juga diakomodasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan organisasi masyarakat untuk mengembangkan program yang mendukung pemberdayaan perempuan, sehingga mereka dapat berkontribusi lebih besar dalam pengambilan keputusan politik di tingkat lokal. Program-program ini dapat mencakup pelatihan keterampilan, peningkatan kesadaran akan hak-hak politik, serta dukungan dalam membangun jaringan sosial yang kuat. Selain itu, saran lain adalah untuk melibatkan perempuan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program tersebut, sehingga mereka merasa memiliki dan berkomitmen terhadap inisiatif yang ada. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan partisipasi perempuan dalam politik lokal dapat meningkat, yang pada gilirannya akan memperkuat kualitas demokrasi dan menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alex, A., Nasiwan, N., Abdillah, A., & Haris, M. (2023). Women in local politics: Insights from Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesia Perempuan dalam politik lokal: Wawasan dari Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesia. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 36(1), 126-140.
- Bennett, L. (2020). "Women's Political Participation in the 21st Century: A Global Perspective." *Journal of Women, Politics & Policy*, 41(1), 1-25.
- Beriansyah, A., Muhammad, H. A., & Pratiwi, C. S. (2023). Perempuan dalam Arus Politik Lokal: Studi Elektoral Keterpilihan Perempuan Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Provinsi Jambi. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(2), 345-357.
- Darmastuti, A. (2020). Partai Politik, Pemilihan Umum dan Peran Perempuan dalam Politik dan Pembangunan.
- Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal. (n.d.). (n.p.): Publica Indonesia Utama.
- Huda, K. (2020). Peran Perempuan Samin Dalam Budaya Patriarki Di Masyarakat Lokal Bojonegoro. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 14(1), 76.
- Karam, A. (2021). "Gender Quotas and Women's Political Representation: Evidence from the Middle East and North Africa." *Middle East Journal of Politics*, 13(2), 45-67.
- Machmud, H. (2019). Perempuan dan politik lokal (studi kasus pemilihan kepala daerah di sulawesi tenggara). *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 14(1), 91-105.
- Norris, P., & Lovenduski, J. (2019). "Gender and Political Representation: The Role of Political Parties." *Party Politics*, 25(5), 1-15.
- Perempuan & Kebijakan Publik. (2023). (n.p.): Universitas Brawijaya Press.
- Politik Identitas di Indonesia: Edisi Revisi. (2020). (n.p.): Universitas Brawijaya Press.
- Putrika, D. A., Noak, P. A., Ervantono, T., & Duarte, E. F. B. (2024). Analisis Keterlibatan Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu (Studi Kasus: TPS Khusus Perempuan Pada Pemilu Tahun 2020 di Denpasar). *Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik*, 1(5), 162-175.
- Riyanti, R. (2021). Perempuan Dalam Pusaran Pemilu. Indonesia: NEM.
- Sadiq, F., & Khan, A. (2023). "Barriers to Women's Political Participation in South Asia: A Comparative Analysis." *Asian Journal of Political Science*, 29(1), 23-40.
- Safitri, R. M. (2019). Partisipasi Perempuan dalam Ranah Politik Lokal: Kajian Sosial Politik di Klaten Jawa Tengah. *Islamic Management and Empowerment Journal*, 1(2), 177-190.
- Sosiologi Politik, Pengantar Kritis. (2019). (n.p.): Nusamedia.
- Tedjo, P. (2022). Peran Perempuan Dalam Pembangunan Politik. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 19(1), 25-31.
- Toyibah, D. (2020). Dari patriarki menuju politik kesetaraan: studi refleksifitas & partisipasi politik mahasiswa. Indonesia: LKiS.
- Trihastuti, M., & Puspitasari, P. (2022). Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 (Studi Kasus Di Desa Pasir Batang Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya). *Mores: Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan*, 4(2), 105-118.

- UN Women. (2020). "Women's Participation in Political Life: A Global Perspective." *UN Women Report*.
- Wula, H. V. M., & Anggraini, T. (2022). Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 5(2), 201-208.
- Zetterberg, P. (2022). "The Role of Women in Local Governance: A Comparative Study." *Local Government Studies*, 48(3), 345-362.